

PERANAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI PERGURUAN TINGGI

THE ROLE OF ISLAMIC STUDENTS ASSOCIATIONS OF YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY IN POLITICAL EDUCATION IN THE UNIVERSITY

Oleh: Nanik Widiana Sari dan Dr.Suharno, M.Si

14401241038@student.ac.id

Nanikwidiana@gmail.com

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pendidikan politik HMI UNY, peranan HMI UNY dalam pendidikan politik, dan hambatan yang dihadapi oleh HMI UNY dalam melaksanakan pendidikan politik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan model deskriptif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* yang terdiri dari anggota dan alumni HMI UNY. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Validitas data dalam memeriksa keabsahan data pada penelitian ini menggunakan taraf kepercayaan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data dilakukan secara siklus yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Konsep pendidikan politik HMI UNY merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan terhadap kader. Peranan HMI dalam pendidikan politik yaitu dalam membentuk warga negara yang baik dan memiliki kesadaran serta perbuatan politik atau melek politik dalam menyiapkan kader bangsa, keterampilan yang dimiliki baik dari segi diskusi, manajemen forum dapat diterapkan di Kampus. Faktor yang menghambat HMI dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi mahasiswa meliputi krisis kaderisasi, adanya benturan waktu pelaksanaan kegiatan, militansi dari setiap individu yang rendah, rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan politik, organisasi HMI membutuhkan penguatan kelembagaan di Kampus, dan Kultur UNY yang merupakan kampus pendidikan.

Kata Kunci: Himpunan Mahasiswa Islam, Pendidikan Politik, dan Perguruan Tinggi.

Abstract

This study aims to describe the concept of political education within the Islamic Students Associations of Yogyakarta State University, the roles of Islamic Students Associations of Yogyakarta State University in political education within the university, The obstacles of doing political education in the university. This is a qualitative research with descriptive method. The subject of this research was chosen using purposive technique, they are the members and alumni of Islamic Students Associations of Yogyakarta State University. Interviews, observations, and documents collection were used as data collection techniques. The kind of Validity was using data confidence level while the triangulation technique was used. The data analysis technique was done by cycle such as data reduction, data presentation, and conclusion. The result of this research showed that: The political concept of Islamic Students Associations of Yogyakarta State University is one of the effort to create understanding in the form of knowledge and skills toward the cadres. The roles are hugely important to create well political aware citizens on preparing the future generation for the country. Moreover, the basic skills mastered by students on discussion, forum management, and others were effectively used in the university. The factors that implementation of political educations as crisis cadres, imbalance schedule, and low self militancy. Meanwhile, the extern factors consist of the lack of awareness regarding the importance of political education, the organization needs to strengthen the institutional part within the university, and Yogyakarta State University as the university focused in education.

Keywords: Islamic Students Associations, Political Education, and University.i

PENDAHULUAN

Dewasa ini khususnya dalam dunia politik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik semakin menurun. Masyarakat acuh tak acuh, apatis terhadap politik saat ini, salah satunya karena maraknya kasus korupsi yang telah diketahui dari tahun ke tahun, tingkat kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) merilis temuan-temuan mengenai kasus korupsi di Indonesia secara keseluruhan menurut kinerja penanganan perkara kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) selama 2016, ICW menemukan jumlah kasus korupsi sebanyak 482 kasus dengan jumlah tersangka 1.101 tersangka dan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun rupiah.

Melihat keadaan politik di Indonesia yang semakin miris, tentunya diperlukan suatu perubahan. Perubahan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini peran pemudalah yang sangat dibutuhkan, khususnya peran mahasiswa. Karena mahasiswa merupakan *agen of change*, aktor dalam pembangunan dan perubahan. Dengan demikian untuk menumbuh kembangkan perpolitikan di Indonesia di perlukan suatu peran mahasiswa untuk bergerak dalam satu tujuan yaitu membuat pembangunan dan perubahan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Mahasiswa adalah sekumpulan orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi disebuah instansi, mahasiswa mengambil peran penting dalam suatu negara yaitu sebagai kader/penerus para tokoh negara. Mahasiswa adalah aset berharga dalam suatu negara, yang menjadi penerus dan masa depan bangsa dan negara. Mahasiswa harus mempunyai karakter yang kuat dalam pembangunan negara, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global.

Mahasiswa sebagai pemegang estafet kepemimpinan harus membekali diri dengan pembangunan karakter dan ilmu pengetahuan. Untuk itu maka penting diberikannya pendidikan politik di

Perguruan Tinggi. Pendidikan politik merupakan suatu proses belajar dalam upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggungjawab secara etika/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

Pendidikan kewarganegaran (PKn) adalah bentuk pendidikan politik formal yang memiliki tujuan bagaimana membentuk warga negara yang baik (*good citizen*), yakni warga negara yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pkn sebagai pendidikan politik merupakan salah satu bentuk sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai, sikap, dan etika politik dalam suatu negara. Dengan adanya sosialisasi politik maka seseorang telah mendapatkan proses dalam menentukan sikap dan fakta-fakta terhadap politik yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Anggara (2013: 85), Agen-agen sosialisasi politik terdiri atas 6 (enam) agen, yaitu keluarga, kelompok bermain atau bergaul, sekolah, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik secara langsung.

Dengan diberikannya sosialisasi politik di bangku sekolah diharapkan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mampu mengenali, serta menjunjung tinggi budaya daerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik secara nasional maupun internasional. Budaya yang dijunjung tinggi oleh negara yang dimaksud adalah budaya saling menghormati, menghargai, menjunjung tinggi nilai dan norma, serta memiliki sikap tanggungjawab. Kesemuanya itu bisa diperoleh dari pendidikan politik yang diberikan di Perguruan Tinggi, baik melalui pendidikan formal yakni pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan informal misalnya melalui organisasi dalam bentuk gerakan/himpunan/asosiasi.

Untuk membentuk warga negara yang baik dinilai sangat kurang, jika hanya diperoleh melalui pendidikan formal. Mahasiswa harus berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bernegara yang senantiasa harus diwarnai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa, ideologi nasional, dan dasar negara. Sehingga mahasiswa perlu menambah wawasannya melalui pendidikan informal baik organisasi *intra* kampus maupun organisasi *ekstra* kampus sehingga mahasiswa dapat melakukan upaya lebih dalam memahami dan mengidentifikasi karakteristik warga negara yang demokratis yang sejalan dengan demokrasi Pancasila.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih organisasi HMI sebagai objek penelitian. Banyak organisasi mahasiswa yang ada saat ini, diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan lain-lain. HMI hadir lebih dulu dari pada organisasi Islam yang lain, yakni dibentuk pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H atau 5 Februari 1947. Dengan demikian HMI sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia maka dinilai HMI adalah organisasi yang matang akan pengalaman, dan tahan banting akan perjuangan.

HMI sebagai organisasi mahasiswa dinilai telah berhasil mencetak kader-kader penerus bangsa. Seperti Dahlan Ranuwiharjo, Deliar Noer, Nurcholish Madjid, Ahmad Syafi Maarif, Kuntowijoyo, Endang Syaifuddin Anshori, Chumaidy Syarif Romas, Agussalim Sitompul, Dawam Rahardjo, Immaduddin Abdurrahim, Ahmad Wahib, Djohan Effendi, Ichlasul Amal, Azyumardi Azra, Fachry Ali, Bahtiar Effendy, dan lain sebagainya. Terdapat juga tokoh-tokoh sosial-ekonomi-politik seperti Anies Baswedan, HMS Mintaredja, M, Sanusi, Bintoro Cokro Aminoto, Ahmad Tirtosudiro, Amir Radjab Batubara, Mar'ie Muhammad, Sulastomo, Ismail Hasan

Metareum, Hamzah Haz, Bahtiar Hamzah, Ridwan Saidi, Jusuf Kalla, Amien Rais, Akbar Tanjung, Fahmi Idris, Mahadi Sinambela, Ferry Mursyidan Baldan, Hidayat Nur Wahid, Marwah Daud Ibrahim, Munir SH, Adyaksa Dault, Abdullah Hemahua, Yusril Ihza Mahendra, Syaifullah Yusuf, Bursah Jarnubi, Hamid Awwaluddin, Jimlie Asshiddiqi, Anas Urbaningrum, dan masih banyak lagi (<https://hmiuny.wordpress.com/2016/05/21/biografi-lafran-pane-pendiri-hmi/>) diakses pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 2:55 wib.

Alumni HMI (KAHMI) tersebut di atas telah tersebar di berbagai bidang, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah-tengah masyarakat. Di lembaga negara eksistensi mereka sangat nyata terlihat, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah ada yang mengisi jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, Alumni HMI juga memiliki peranan yang tak kalah penting seperti di LSM, ormas, dan juga di dalam dunia usaha. Hal tersebut telah membuktikan bahwa HMI secara fisik sudah memenuhi janjinya yaitu dalam mencetak kader bangsa.

Meskipun HMI sudah berhasil mencetak tokoh/kader bangsa dengan peran dan posisi yang penting, tugas dan kewajiban HMI belum selesai. Melihat kondisi negara kita dewasa ini, dengan merajalelanya tingkat korupsi dan lemahnya penegakan hukum di negara kita. Dalam bukunya Alfian, 2014: XVIII, Mahfud MD dalam sambutannya mengatakan jika HMI dan KAHMI masih merasa bertanggungjawab atas kelangsungan negara yang ikut dibangunnya dengan segala pengorbanan maka saat ini ada panggilan sejarah yakni ikut memberantas korupsi dan membangun supremasi hukum. Hal ini tidak mudah, karena banyak alumnus-alumnus HMI yang terlibat kasus tersebut. Meski pahit hal ini harus diakui sebagai kenyataan yang tidak bisa disembunyikan lagi. HMI berkewajiban untuk membersihkan limbah sejarah dan politik ini. Menurut peneliti,

hal ini dapat diatasi sejak dini melalui pengukuhan pendidikan politik dalam organisasi HMI di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mendorong untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana konsep pendidikan politik yang dilakukan oleh HMI di Perguruan Tinggi, bagaimana peranan HMI UNY dalam pendidikan politik di Perguruan Tinggi, dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh HMI dalam melaksanakan pendidikan politik di Perguruan Tinggi. Sehingga sebagai organisasi mahasiswa, HMI dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam pendidikan politik informal di Perguruan Tinggi. Dengan mengambil judul penelitian: “Peranan Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Yogyakarta dalam Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan model deskriptif. Menurut Afrizal, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka, data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Kopordinator Komisariat HMI UNY yang beralamatkan di Gang Suryo 17 Gondok Condongcatyr Depok Sleman. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Mei 2018.

Subjek dan Objek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, wawancara

kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut (Sugiyono, 2016: 53). Dengan demikian subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sesuai dengan fokus dari penelitian ini, subjek yang dijadikan informan antara lain pengurus HMI UNY periode 2017-2018 dan alumni HMI (KAHMI) UNY.

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran dalam penelitian. Menurut Prastowo (2012: 203) Sasaran penelitian tidak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkrit adalah yang tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah konsep pendidikan politik HMI UNY, peranan HMI dalam pendidikan politik di Perguruan Tinggi, dan hambatan yang di hadapi oleh HMI UNY dalam melaksanakan pendidikan politik di Perguruan Tinggi.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan Dokumentasi. Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya 2 (dua) orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami (Herdiansyah, 2015: 31). menurut Matthews and Ross dinyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra manusia. Berdasarkan pernyataan ini, indra manusia menjadi alat utama dalam melakukan observasi. Selain indra penglihatan, juga dibutuhkan indra lainnya seperti indra pendengaran, indra penciuman, indra perasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan dokumen, Teknik pengumpulan dokumen atau tulisan-tulisan yaitu meliputi pengumpulan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi

yang diperlukan. Dengan melakukan pengumpulan dokumen ini dapat untuk mengecek kebenaran dan ketepatan informasi yang diperoleh. Pengumpulan dokumen berguna untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.

Validitas Data

Validitas/keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Menurut Afrizal, validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian ini antara lain dengan digunakan taraf kepercayaan data (*creadibility*). Teknik yang digunakan untuk melacak *creadibility* dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi (*triangulation*). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono, terdapat 3 macam triangulasi diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data untuk memperoleh keabsahan data.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam bukunya Afrizal yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif menjelaskan secara mendalam cara data seharusnya dianalisis dalam penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali lagi ke tahap satu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pendidikan Politik

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Yogyakarta

Mahasiswa adalah *agen of change* (agen perubahan). Sebagai organisasi

ekstrakampus, HMI UNY dikenal sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan yang dituntut untuk melakukan sebuah perubahan. Seperti yang dikemukakan oleh Arbi Sanit bahwa:

“Ada lima faktor yang menjadikan mahasiswa peka dengan masalah kemasyarakatan sehingga mendorong mereka untuk melakukan perubahan:

1. Sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai pandangan luas untuk bergerak di antara semua lapisan masyarakat.
2. Sebagai kelompok masyarakat yang paling lama mengalami pendidikan, mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik terpanjang di antara angkatan muda.
3. Kehidupan kampus membentuk gaya unik melalui akulturasi sosial budaya yang tinggi di antara mereka.
4. Mahasiswa sebagai golongan yang akan memasuki lapisan atas susunan kekuasaan, struktur ekonomi, dan akan memiliki kelebihan tertentu dalam masyarakat. Dengan kata lain, mahasiswa adalah kelompok elit di kalangan kaum muda.
5. Seringnya mahasiswa terlibat dalam pemikiran, perbincangan, dan penelitian berbagai masalah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilengkapi dengan dokumentasi serta observasi sebagai pendukung penelitian, diperoleh data bahwa konsep pendidikan HMI UNY adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan terhadap kader, pendidikan yang diberikan sudah terkonsep/terencana sesuai dengan konstitusi HMI. Pendidikan yang diberikan oleh HMI berupa pelatihan umum, pelatihan khusus, dan pendidikan keluarga. Pelatihan umum adalah pelatihan yang wajib diikuti oleh anggota HMI. Pelatihan umum berupa latihan kader. Semua organisasi

HMI mewajibkan anggotanya untuk mengikuti Latihan Kader sebagai pendidikan formal HMI. Pendidikan jenis ini menekankan pada penggalian dan pengembangan potensi kreatif kader dengan memberikan prinsip dasar keIslaman, kepribadian, keilmuan, sosial, kemasyarakatan dan keorganisasian melalui proses atau forum pelatihan. Dengan pendidikan yang telah diberikan diharapkan dapat melahirkan mahasiswa Islam menjadi insan Ulul Albab.

Sehingga dengan diberikannya pendidikan politik tersebut dalam organisasi HMI akan memperoleh hasil sebagai berikut sesuai penjelasan Kartono:

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya):
 - a. Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik
 - b. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.
 - c. Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.
 - d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan:
 - a. Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya).
 - b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik).
 - c. Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses sosial politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan Negara.

Maka dalam konteks uraian di atas yang ditulis oleh kartono, setelah diberikannya

pendidikan tersebut kepada organisasi HMI akan memberikan manfaat kepada kader, yakni kader mampu memahami situasi-situasi sosial politik dan memberikan kritik yang membangun serta terarah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada sehingga organisasi HMI mampu berperan dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara. Disamping itu, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuannya melalui organisasi dan mengimplementasikannya pada kehidupan yang lebih luas.

B. Peranan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Yogyakarta dalam Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi

Organisasi mahasiswa ekstrakampus HMI khususnya Koordinator Komisariat (Korkom) Universitas Negeri Yogyakarta memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara kegiatan HMI dalam bidang pendidikan dan politik, dikarenakan HMI memiliki identitas sebagai organisasi politik bagi mahasiswa dan memiliki alumni yang telah menunjukkan keberhasilannya di instansi pemerintahan, seperti yang diungkapkan oleh Karim (1997: 104) bahwa untuk memahami hubungan kegiatan HMI dalam bidang pendidikan dan politik dapat dilihat dari peranan KAHMI dalam memperjuangkan politik HMI, dapat dilihat melalui lobi-lobi di tingkat *suprastruktur* politik, walaupun aktivitas KAHMI secara formal hanya bergerak di bidang kemahasiswaan, kecendekiawanan, keindonesiaan, dan keislaman, tetapi di dalam realitasnya HMI banyak memainkan peranan politik.

Pendidikan politik memiliki peranan dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi baik di Perguruan Tinggi maupun yang lebih luas di dalam masyarakat/negara, yakni dalam meningkatkan partisipasi warga negara terhadap kehidupan bernegara sekaligus sebagai sarana dalam sosialisasi politik.

Menurut Michael & Phillip Sosialisasi politik adalah proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politiknya yang relevan. Pengalaman tersebut tidak perlu bersifat khas politik dengan sendirinya, akan tetapi pengalaman tersebut disebut relevan karena memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya.

Pendidikan politik HMI UNY sebagai sosialisasi politik tercermin dalam bentuk musyawarah-musyawarah atau diskusi-diskusi dalam hal mengemukakan pendapat, memberikan dan menerima kritikan, serta menyalurkan dan mempertahankan kepentingan yang terbaik bagi organisasi tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai ajang laboratorium negara Indonesia yang demokrasi dalam hal ini sebagai lingkup yang kecil. Di samping itu, sosialisasi politik dalam pendidikan politik juga terlihat pada penyelenggaraan Latihan kader sebagai pendidikan dasar anggota HMI. Di harapkan dengan pemberian pendidikan politik melalui lingkup kecil dapat dijadikan bekal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

C. Hambatan yang dihadapi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi

Pendidikan politik sangat diharapkan untuk membentuk kekuatan yang dapat melawan dan memberantas segala tindakan ketidakadilan, ketidakharmonisan, dan segala bentuk penindasan. Akan tetapi, bukan perkara gampang dalam melaksanakan pendidikan politik ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam menyadarkan secara politik warga negara Indonesia seperti yang diungkapkan Kartono, sebagai berikut:

1. Amat sulit menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya hidup dalam iklim penindasan, penghisapan, dan penjajahan sehingga mereka

menjadi “terbiasa” hidup dalam keserba kekurangan dan ketertinggalan. Sulit mendorong mereka ke arah konsientisasi diri mengungkapkan segala problema yang tengah dialami.

2. Apatisme politik dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan menina-bobokan rakyat belaka. Sulit pula untuk mengajak mereka untuk berfikir lain dengan nalar jernih. Bahkan banyak diantara masa rakyat yang takut pada kemerdekaan (dirinya).
3. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah atau kurang, rakyat kebanyakan sulit memahami kompleksitas situasi sosial dan politik di sekitar dirinya.
4. Para penguasa yang otoriter cenderung tidak menghendaki adanya pendidikan politik, karena mereka berkepentingan sekali dengan status quon dan pelestarian rezimnya. Partisipasi aktif dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh rakyat itu tidak dikehendaki, sebab mengurangi kebebasan dan kekuasaan organ-organ ketatanegaraan.

Hambatan yang dialami oleh HMI berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan yaitu krisis kaderisasi, adanya benturan waktu pelaksanaan kegiatan antara HMI dengan di Perguruan Tinggi atau antara organisasi ekstrakampus (HMI) dengan organisasi intrakampus (UKM, HIMA, DPM, BEM, dan sebagainya), dan militansi dari setiap individu yang rendah. Sedangkan faktor eksternal dalam pelaksanaan pendidikan politik HMI yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan politik, membutuhkan penguatan kelembagaan di Perguruan Tinggi, dan Kultur UNY yang merupakan Kampus pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang “Peranan HMI UNY dalam Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi” peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pendidikan politik HMI UNY adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan terhadap kader sehingga dapat melahirkan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa menjadi insan Ulil Albab. Pendidikan politik yang dilakukan oleh organisasi HMI UNY diadakan untuk mempersiapkan kader-kader politik (*output* HMI) yang mampu berfungsi baik di tengah masyarakat. Menurut AD/ART HMI, organisasi HMI adalah organisasi perkaderan dan perjuangan sehingga pendidikan yang diberikan lebih ke sistem perkaderan dan perjuangan yakni dapat dilihat dari upaya HMI dalam meningkatkan kualitas anggota-anggotanya dengan memberikan pemahaman berupa pengetahuan dan keterampilan, serta sebagai organisasi perjuangan melaksanakan ajaran Islam pada kehidupan masyarakat secara bertahap dan konsisten di seluruh aspek kehidupan sebagai suatu bentuk upaya organisasi HMI dalam melahirkan generasi muda yang kelak diharapkan dan mampu menjadi pemimpin bangsa dengan membawa karakter HMI sesuai dengan visi dan misi HMI.
2. Pendidikan politik yang dilakukan oleh organisasi HMI memiliki peranan dalam pendidikan politik di Perguruan Tinggi yaitu dalam menciptakan warga negara yang baik (*good citizen*) yang memiliki kesadaran maupun perbuatan politik atau melek politik dalam menyiapkan kader bangsa. Selain itu, keterampilan dasar yang dimiliki mahasiswa baik dari segi diskusi, manajemen forum dan sebagainya dapat diterapkan di Perguruan Tinggi. Organisasi mahasiswa khususnya HMI

UNY dipandang sangat penting keberadaannya bagi mahasiswa, karena dirasa sangat kurang apabila mahasiswa hanya memperoleh pendidikan politik di Perguruan Tinggi saja. Namun, peranan HMI UNY kurang/belum berperan secara maksimal di Kampus.

3. Faktor yang menghambat HMI dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi mahasiswa terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi krisis kaderisasi, adanya benturan waktu pelaksanaan kegiatan antara HMI dengan Perguruan Tinggi maupun antara organisasi ekstrakampus (HMI) dengan organisasi intrakampus (UKM, HIMA, DPM, BEM, dan sebagainya), dan Militansi dari setiap individu yang masih rendah. Faktor eksternal yang menjadi hambatan yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan politik, organisasi HMI membutuhkan penguatan kelembagaan di Perguruan Tinggi, dan Kultur UNY yang merupakan kampus pendidikan.

Saran

1. Untuk pengurus HMI UNY, sebelum melaksanakan pendidikan politik bagi anggota maupun bagi mahasiswa umum hendaknya melakukan koordinasi dengan semua pengurus, agar tidak terjadi benturan waktu dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi intrakampus dan ekstrakampus lain sehingga peserta dalam kegiatan yang diselenggarakan bisa optimal.
2. Untuk pengurus HMI UNY, perlunya mengembangkan metode dalam penyampaian pendidikan politik yang lebih menarik sehingga lebih banyak mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti pendidikan politik yang diselenggarakan oleh HMI UNY.
3. Untuk mahasiswa, perlunya meningkatkan kesadaran bahwa pendidikan politik melalui

organisasi itu perlu dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan individu maupun kelompok yakni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Bagi Perguruan Tinggi, Khususnya Universitas Negeri Yogyakarta agar lebih terbuka dengan organisasi ekstrakampus sebagai pendukung pendidikan politik bagi mahasiswa.

Hmiuny. (21 Mei 2016). Biografi Lafran Pane, Pendiri HMI. Diambil pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 2:55 wib dari <https://hmiuny.wordpress.com/2016/05/21/biografi-lafran-pane-pendiri-hmi/>

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alfian, M.A. (2013). *HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, M. R. (1997). *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Maarif, A.S. (2006). *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Michael, R & Phillip, A. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sanit, A. (2014). *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta